

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Buku:

A. Kansil, 1983, "Daerah Kita", Jakarta: Ghalia Indonesia

Achmad Rubaei, 2007. *Hukum Pengadaan Pidana untuk Kepentingan Umum*,
Malang: Bayumedia Publishing

Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2012,

Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika

Dirto Hadisusanto dkk, dalam Dwi Siswoyo, Pengantar Ilmu Pendidikan FIP
UNY : Yogyakarta, 2011

Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media
Group, 2009.

Farida, Siti Iba Iga, and Rochmani Rochmani. "Kebijakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur." *Jurnal
Ilmiah Dinamika Hukum* 21.2 (2020): 44-51.

Faozi, Safik, Rochmani Rochmani, and Adi Suliantoro. "DIALOG HUKUM
DAN PERUBAHAN SOSIAL." (2020).

Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada Press

Hasbullah,H.M, *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta / 2015 ,
Hal 2

Joni Emirzon , *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi , Mediasi , Konsiliasi Arbitrase* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2001.

Limbong, Bernhard (I). *Pengadaan Pidana Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. 2011. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.

Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti . 2001

M. Laica Marzuki , *Berjalan – Jalan di Ranah Hukum* , Buku Kesatu , Edisi Revisi Cetakan Kedua , Sekretarian Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI , Jakarta , 2006.

Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Liberty

Rianto Adi,2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Rochmani, Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati. "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN." (2020).

Purnama, Andi, and Rochmani Rochmani. "DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI USAHA PETERNAKAN AYAM DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA CANDIREJO MOJOTENGAH WONOSOBO." Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 18.1 (2017): 17-27.

Rochmani, Rochmani, and Safik Faozi. "Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan." Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 18.1 (2017): 60-73.

Rochmani, Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati. "LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA." *Bina Hukum Lingkungan* 5.3 (2021): 536-553.

Siswoyo, Dwi, et al. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Soehino, *Asas – Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta Liberty, 1984

Soerodjo, *Proses Pendaftaran Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Solly Lubis 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju

Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, : UNY Press 2012

Supriadi. *Hukum Agraria*. 2007. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsimi Arikunto , 1998 , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,
Jakarta : Rineka Cipta

Suhartono Dkk, *Parlemen Daerah (Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK
Gotong – Royong)* , Cetakan Pertama , Laper Pustaka Utama ,
Yogyakarta , 2000.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori
dan Praktik)*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada.

Snelbecker1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja
Rosdakarya

Syaefudin Teori Pembelajaran Bahasa: Suatu Catatan Singkat , Penerbit
Garudhawaca (2015)

Widjaja HAW,Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh
HAW. Widjaja , Ed.1 Cet.2 , Jakarta , Raja Grafindo Persada : 2004

Jurnal:

Achmad Rifai, Penentuan Pemilik Hak atas Pidana Dalam Sengketa Pidana
Sebagai Fasilitas Pendidikan, *Jurnal Yustitia* Vol.20, No.1, 2019, hlm.14.

Ani Sri Rahayu, “Pengantar Pemerintahan Daerah”, (Malang: Sinar Grafika,
2018)

- Efianingrum, A. (2009). Jurnal Dinamika 2009 Mengurai Akar Kekerasan (Bullying) di Sekolah. *Jurnal Dinamika*.
- Budi Irawan, Pengadaan Pidana Berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Pidana bagi pembangunan untuk kepentingan umum, *Jurnal Idea Hukum*, Vol.1, No.2, 2015, hlm. 139.
- Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Daerah krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. Samarinda. *eJurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 5 no 1. Fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Mulawarman. Samarinda*
- Dwi Siswoyo , Ilmu Pendidikan Dalam Tantangan, Cakrawala Pendidikan Nomor 1, Tahun Xv, Februari L1996
- Langeveld, M.J. (Martinus Jan) , Beknopte theoretische pedagogiek , Utrecht University Repository 1998.
- Laelatul Istiqomah, Tiga pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud, *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usai Dini, Vol.1, No.2, Juni 2016*.
- Mashuri Mashab , Politik Pemerintahan Daerah di Indonesia , Cetakan I , Pol Gov , Fisipol UGM , Yogyakarta , 2013
- Mega Raharja . 2015 , Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah , Malang , Jurnal *Adminsitrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.

Mertokusumo , Sudikno. 2003 . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta :
Liberty

Muwahid.2016.Prinsip-Prinsip Pengadaan Pidana Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.Jurnal Studi Keislaman. Vol 6 Nomor 1

Nadiyah 2014 Akibat Hukum Perubahan Daerah Menjadi Kelurahan Atas Pidana
Bengkak Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Daerah .Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang

Nimatul Huda, Op, Cit, hlm 47, Dikutip dari M.Laica Marzuki, Berjalan-jalan di
Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat
Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Nunung Runiawati.2013. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (suatu pendekatan
teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset).
Universitas Padjajaran Bandung

Ujang Chara, Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Memenuhi Tuntutan
Dunia Kerja, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24, No.1 Februari 2011.

Fandri Entiman Nae, Kepastian hukum terhadap hak milik atas Pidana yang sudah
bersertifikat, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No.5, November, 2013

Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerinthn Daerah, fiat justisia *Jurnal
Ilmu Hukum*. Volume 8 No

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Pidana Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Daerah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kristiyani, Dkk., Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954, Dalam Himpunan Peraturan-
Peraturan Daerah DLL Perihal Pidana, Yogyakarta, 1981

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Pidana Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Pidana Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Website :

Wikipedia,"Pemerintah", (Online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, diakses 17 Maret 2021), 2021.

Irwan Sahaja, "Semua Tentang Pendidikan", (Online) (<https://irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html>, 17 Maret 2021 (2020

Bumdes.2017."Mekanisme Penggunaan Pidana Kas Daerah". <http://bumdes.id/blog/2017/10/24/mekanisme-penggunaan-Pidana-kas-Daerah/> diakses pada tanggal 17 Maret 2021

<https://setkab.go.id/revisi-pp-Daerah-marwan-gembira-status-pengelolaan-Pidana-bengkak-kembali-ke-Daerah2016> diakses pada tanggal 19 Maret 2021